

Perceraian sebagai Tren Perempuan Buruh Pabrik Garmen di Kabupaten Jepara

Ozi Setiadi

Institut Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, Indonesia

ozisetiadi@iainkudus.ac.id

Abstract

Emansipasi perempuan buruh pabrik garmen di Kabupaten Jepara memiliki dampak yang paradoks. Satu sisi berdampak positif bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan, namun di sisi lain terdapat banyak dampak negatif seperti ketidakseimbangan hidup kerja-rumah, tekanan psikologis, hingga perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk membahas emansipasi perempuan yang berdampak perceraian pada pekerja pabrik garmen di Kabupaten Jepara. Jenis penelitian adalah penelitian pustaka. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan literatur dan dokumen yang diperoleh melalui internet atau berita online. Data disajikan mulai dari pengumpulan data, reduksi data, analisis data, hingga penyajian data. Hasilnya, emansipasi perempuan buruh pabrik garmen di Kabupaten Jepara dapat berdampak pada perceraian. Perceraian menjadi sebuah hal yang dianggap sebagai tren bagi buruh pabrik perempuan. Sebab adanya berbagai macam faktor seperti faktor ekonomi, resistensi sosial, ketidakseimbangan hidup kerja-rumah, hingga tekanan psikologis. Sebab adanya berbagai macam faktor, seperti faktor ekonomi, resistensi sosial, ketidakseimbangan hidup kerja-rumah, hingga tekanan psikologis

Keywords: perceraian, emansipasi perempuan, buruh pabrik garmen

Introduction

Perempuan memiliki peranan penting dalam industri (KEMENKO PMK, 2019). Banyak diantara mereka yang bekerja di pabrik, seperti pabrik tas, pabrik sepatu, dan pabrik baju. Di Kabupaten Jepara, hal ini sudah menjadi pemandangan yang biasa (Kusrini & Suryani, 2022). Penghasilan yang mereka dapatkan dari hasil bekerja di pabrik tersebut, terkadang, lebih besar dari penghasilan yang suami mereka peroleh. Penghasilan yang besar ini berdampak paradoks. Satu sisi dapat menambah keuangan keluarga, meningkatkan taraf hidup, dan kesejahteraan. Akan tetapi, di sisi yang lain, penghasilan istri yang lebih besar menyebabkan kemandirian dan merasa mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, sikap superior terhadap suami, hingga ketidakpedulian terhadap anak (Mayangsari & Amalia, 2018). Fakta-fakta inilah yang kemudian dapat mengakibatkan timbulnya keinginan untuk melakukan perceraian.

Perceraian yang terjadi di Jepara, dalam hal ini cerai gugat yang dilakukan oleh istri terhadap suami, dilatarbelakangi kuat oleh ekonomi. Saidah mengemukakan bahwa faktor pertama cerai gugat di Jepara adalah persoalan ekonomi (Saidah, 2019). Ini menandakan

bahwa penghasilan perempuan yang lebih besar dari suaminya memicu terjadinya perpisahan ditambah dengan tidak adanya kemitraan gender yang saling menguatkan. Lutviani berpendapat kemitraan gender belum sepenuhnya dipraktikkan oleh masyarakat di Jepara, khususnya di Kecamatan Bangsri. Padahal, implementasi kemitraan gender dalam keluarga sangat urgen demi peningkatan ketahanan keluarga (Lutviani, 2022). Belum lagi pernikahan dini, sebagaimana dikemukakan oleh Suparno, yang juga menjadi faktor kuat yang mendorong terjadinya perceraian di Jepara (Suparno, 2021). Artinya, kematangan emosional yang erat kaitannya dengan usia juga menentukan dalam persoalan ini. Perempuan yang bekerja dan merasa mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, jika tidak dibarengi dengan kematangan emosional, dapat menyumbang angka perceraian.

Tulisan ini bertujuan untuk membahas tentang perceraian sebagai dampak dari emansipasi perempuan pada pekerja pabrik di Kabupaten Jepara. Emansipasi perempuan mendorong perempuan untuk bekerja dan berkarya di sektor publik, seperti di pabrik tas, pabrik sepatu, dan pabrik baju di Jepara. Hal ini menjadikan mereka mandiri secara ekonomi, memiliki pergaulan dan relasi yang luas, aktif dalam media sosial, dan kejiwaan yang kembali seperti remaja. Capaian-capaian tersebut, terkadang, tidak diikuti oleh kedewasaan dan kebijaksanaan dalam berpikir, bersikap dan bertindak yang kemudian berdampak pada disharmoni dalam keluarga yang berujung pada perceraian.

Perempuan (istri) pekerja pabrik, sebagian, memiliki pemahaman yang sama seperti laki-laki. Mereka merasa mampu berperan sebagai kepala keluarga, menghidupi keluarganya, memiliki kemandirian ekonomi, hingga berkesempatan yang sama seperti laki-laki untuk melakukan perselingkuhan. Emansipasi perempuan telah mendorong perempuan-perempuan yang tidak memiliki kedewasaan dan kebijaksanaan dalam berpikir untuk menentukan pilihan mereka masing-masing tanpa berdiskusi dengan keluarga.

Method

Penelitian ini membahas tentang analisis dampak emansipasi perempuan buruh pabrik garmen di Kabupaten Jepara. Penelitian tentang dampak emansipasi perempuan buruh pabrik ini belum banyak dilakukan. Namun, penelitian tentang emansipasi secara umum sudah banyak dipublikasi. Oleh sebab itu, penelitian tentang tema tersebut dilakukan. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka. Data diperoleh dari sumber literatur dan dokumen. Data dianalisa dengan menggunakan teori emansipasi. Sementara pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan untuk mendeskripsikan fakta-fakta literatur terkait dengan aktivitas yang menjurus pada emansipasi perempuan buruh pabrik di Kabupaten Jepara. Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti akan mampu mengumpulkan data dalam bentuk literatur dan dokumen. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik literatur dan dokumen memungkinkan peneliti untuk menemukan data-data dan fakta-fakta literatur terkait dengan tema penelitian. Data-data yang digunakan adalah data sekunder yang didapat dari internet atau berita online yang juga membahas tentang

emansipasi perempuan buruh pabrik di Jepara. Sedangkan tahapan penyajian data dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, analisis data, penyajian data.

Theoretical Review

Konsep Emansipasi Perempuan

Emansipasi perempuan adalah sebuah kebebasan yang diberikan kepada perempuan untuk menuntut ilmu pengetahuan, sehingga mereka dapat berfikir maju seperti kaum laki-laki (Nainggolan, 2021). Emansipasi merupakan pembebasan diri dari perbudakan (Nuryati, 2015). Qasim Amin menekankan bahwa dalam Islam hendaknya perempuan diberikan hak-hak secara proporsional. Misalnya, hak dalam pendidikan, yang mana mereka harus memperoleh hak yang sama dengan hak pendidikan laki-laki. Oleh karena itu, nilai-nilai Islam yang penuh dengan keadilan, menuntut tanggung jawab kepada Allah Swt. (Siregar, 2017). Pernyataan Qasim Amin memberikan penjelasan bahwa Islam tidak melarang perempuan untuk memperoleh pendidikan yang sama dengan laki-laki. Lebih luas lagi, emansipasi menghendaki, baik perempuan dan laki-laki, hendaknya memiliki akses yang sama dalam berbagai aspek.

Emansipasi perempuan merupakan suatu wujud dari perjuangan kaum perempuan agar harkat dan martabatnya bisa sejajar dengan kaum laki-laki. Perjuangan perempuan memiliki makna yang beragam. Emansipasi perempuan yang dikehendaki oleh R.A Kartini misalnya, bukan emansipasi perempuan yang dikumandangkan oleh para pejuang emansipasi perempuan dari Barat atau Amerika Serikat, yang menghendaki persamaan mutlak antara laki-laki dengan perempuan dalam segala hal tanpa mempertimbangkan unsur-unsur yang bersifat kodrati. Sebaliknya, perjuangan emansipasi perempuan di Indonesia harus mempertimbangkan sifat-sifat kodrat dari perempuan itu sendiri, yang menjunjung harkat dan martabat putri Indonesia (Setyagama, 2014). Emansipasi memiliki berbagai macam bentuk, diantaranya emansipasi liberal, radikal, marxis, interseksional kultural, postmodern, transnasiona, hingga lingkungan. Meskipun demikian, emansipasi perempuan tetap memiliki dampak dalam praktiknya.

Emansipasi perempuan tentu memiliki dampak positif bagi perempuan. Meskipun demikian, emansipasi perempuan, sadar atau tidak telah berdampak pada pergeseran peran perempuan termasuk diantaranya peran ekonomi. Pergeseran peran tersebut juga diperkuat oleh adanya perjuangan kaum feminis untuk melakukan kesetaraan gender. Di luar itu semua, karena alasan tertentu, perempuan yang dulu secara ekonomi hanya dianggap sebagai tulang rusuk bagi suami, berperan sebagai pendamping, teman, mitra dan bahkan dianggap menumpang hidup pada suami, kini bergeser menyandang peran sebagai tulang punggung (pencari nafkah) bagi keluarganya. Tentu saja ini tidak bisa dianggap sebagai kemajuan, tetapi paling tidak peran ekonomi perempuan saat ini tidak bisa dipandang sebelah mata khususnya oleh kaum laki-laki (suami). Untuk bisa memahami pergeseran peran tersebut, Fadilah menyebut harus memandang berbagai aspek kehidupan perempuan seperti penciptaan perempuan, bagaimana perempuan dalam pandangan Islam, karakteristik perempuan dan

masih banyak aspek lainnya (Fadilah, 2018). Sampai di sini, dapat diketahui bahwa peran perempuan telah malamaipergeseran tidak hanya sebatas sumur, dapur dan kasur, atau dalam istilah masyarakat Jawa macak, manak, dan masak semata.

Emansipasi telah mendorong perempuan untuk berperan sama dengan laki-laki. Meskipun peran ini tidak akan sama persis, apalagi peran kodrati perempuan yang tidak dapat disamakan dengan laki-laki menjadi tantangan tersendiri bagi pejuang emansipasi. Di era pro-emansipasi seperti saat ini, perempuan harus menjalankan peran ganda tanpa harus meninggalkan kodratnya sebagai perempuan. Di satu sisi, perempuan dituntut untuk selalu “produktif” dalam karir dan kehidupan masyarakatnya. Di sisi lain, perempuan juga perlu menjalankan kewajiban mereka. Misalnya, bagi wanita yang belum memiliki pasangan, hendaknya melayani orang lanjut usia. Dan jika sudah mempunyai pasangan, perempuan yang berbakti kepada suaminya, sekaligus menjadi ibu dan teladan bagi anak-anaknya. Hal itulah yang akan menjadi tantangan terbesar bagi wanita tersebut (Riyadi, 2015).

Discussion

Perempuan Buruh Pabrik Garmen

Ada beberapa pabrik garmen di Kabupaten Jepara. Mereka diantaranya adalah PT. Hwaseung Indonesia atau lebih di kenal dengan PT. HWI, PT Kanindo Makmur jaya, PT. Jiale Indonesia Textil, PT. Starcam Apparel Indonesia, PT Samwon Busana Indonesia, PT. Bunga Matahari Jepara, PT. SAMI JF atau PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia, PT Parkland World Indonesia. Delapan pabrik garmen tersebut mampu menyerap 1.700 hingga 20.000 tenaga kerja, termasuk tenaga kerja perempuan. Pabrik-pabrik ini memproduksi tekstil, sepatu, hingga pakaian, Dari delapan pabrik tersebut, beberapa diantaranya merupakan perusahaan asing yang berdiri di Jepara. Umumnya perusahaan-perusahaan ini berdiri di atas tahun 2010. Mereka tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Jepara, yaitu Kecamatan Kalinyamatan, Kecamatan Batealit, Kecamatan Pecangaan, dan Kecamatan Mayong (Admin, 2024). Keberadaan perusahaan-perusahaan ini mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Jepara.



Gambar 1: Para pekerja perempuan sedang menjahit

Perusahaan-perusahaan garmen tersebut memiliki jumlah karyawan perempuan yang banyak. Berdasarkan hasil pengamatan, mayoritas karyawan garmen bidang produksi adalah perempuan. Para pekerja perempuan mengambil peran penting dalam produksi di perusahaan,

sebagaimana terlihat pada gambar di atas. Perempuan memiliki penghasilan yang berada pada level Upah Minimum Regional (UMR), yaitu Rp. 2.272.626. Upah ini masih ditambah jika terdapat lembur saat produksi. Disamping itu, karyawan juga mendapatkan perlindungan kerja dengan jaminan kerja dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Fasilitas yang diperoleh ini tentu memberikan para perempuan pekerja pabrik berada pada level yang lebih baik daripada laki-laki yang tidak bekerja.

Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara menyebutkan pada tahun 2021 Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Jepara tercatat sebesar 91,28 persen dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 56,66 persen. Indeks tersebut memperlihatkan bahwa perempuan dan laki-laki menempati posisi yang tidak terpaut jauh. Guna mengukur Indeks Pembangunan Gender (IPG), difokuskan pada faktor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di berbagai level. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi yaitu dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan di parlemen, serta dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, dan teknisi. IDG digunakan untuk melihat sejauhmana pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Kesemua ini berawal dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur kualitas hidup manusia dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi (BPS Jepara, 2022). Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Jepara dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Kabupaten	IPM Laki-laki			IPM Perempuan		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Blora	74,23	74,45	74,67	62,32	62,45	63,16
Rembang	75,04	74,90	75,24	65,17	65,16	65,70
Pati	75,96	76,44	76,68	69,58	69,94	70,71
Kudus	79,02	79,15	79,27	73,41	73,41	73,69
Jepara	75,83	75,94	76,30	68,94	69,10	69,65

Tabel 1: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Jepara dan Eks Karesidenan pati, 2019 – 2021. Sumber : Indeks Pembangunan Manusia menurut jenis kelamin (BPS Jepara, 2022)

Tabel di atas memperlihatkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Jepara dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut terlihat tidak hanya pada indeks pembangunan manusia bagi laki-laki, tetapi juga perempuan. Meskipun peningkatan masih berkisar pada satu digit angka, namun peningkatan tersebut sangat berarti. Lebih jauh, pada tabel indeks pembangunan manusia di atas juga terlihat bahwa perbedaan pembangunan manusia laki-laki dan perempuan tidak terpaut jauh, hanya sekitar 7%. Ini berarti perempuan-perempuan di Kabupaten Jepara memiliki peluang

yang hampir sama dengan laki-laki dalam berbagai akses seperti pada bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan.

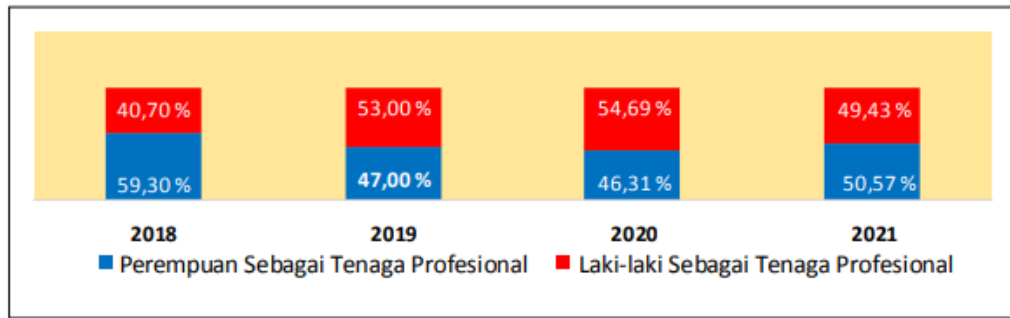
Partisipasi pada bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan merupakan bagian dari pengukuran pemberdayaan gender. Adapun indeks pemberdayaan gender di Kabupaten Jepara berdasarkan pada partisipasi tersebut dapat dilihat pada kurva berikut:



Gambar 2. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Jepara dan Eks Karesidenan Pati, 2018 – 2021. Sumber : Statistik Gender Kabupaten Jepara 2021 (BPS Jepara, 2022)

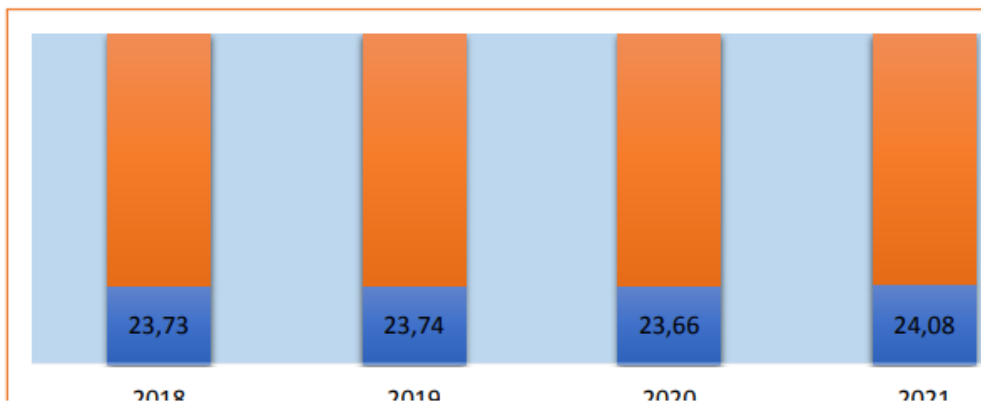
Kurva di atas memperlihatkan terjadi peningkatan yang signifikan pada pembangunan gender tahun 2018 ke 2019. Akan tetapi, pembangunan gender tersebut mengalami penurunan sebesar 2,44% di tahun 2020. Penurunan ini disinyalir kuat karena adanya pandemi Covid-19. Pandemi memang telah membuat berbagai bidang mengalami kemunduran. Meskipun demikian, pada tahun 2021 indeks pembangunan gender kembali menguat, naik sekitar 0,9%. Kenaikan ini tentu semakin memperlihatkan posisi perempuan yang menguat pula di Kabupaten Jepara.

Pembangunan gender di Kabupaten Jepara telah mendorong perempuan untuk terlibat pada peerjaan-pekerjaan di ranah publik. Mereka bekerja sebagai tenaga profesional sebagaimana laki-laki. Data Badan Pusat Statistik (BPS) di Kabupaten Jepara memperlihatkan bahwa perempuan di tahun 2021 menempati jumlah yang lebih besar daripada laki-laki, yakni sekitar 50,57%. Sementara laki-laki berada pada posisi 49,43%. Angkat ini memperlihatkan bahwa perempuan memegang peranan yang signifikan di Kabupaten Jepara. Meskipun di dua tahun sebelumnya, yakni tahun 2019 dan 2020 posisi perempuan masih berada di angka 40an persen. Guna lebih memperjelas posisi perempuan dan laki-laki di Kabupaten Jepara sebagai tenaga profesional, dapat dilihat pada bagan di bawah ini :



Gambar 3. Perkembangan Keterlibatan Perempuan Sebagai Tenaga Profesional di Kabupaten Jepara Tahun 2018 – 2021 (persen). Sumber : Statistik Gender Kabupaten Jepara 2021 (BPS Jepara, 2022)

Perempuan di Kabupaten Jepara memiliki sumbangsih pendapat. Sumbangsih pendapatan perempuan tersebut juga mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Meskipun sumbangsih pendapat perempuan di Kabupaten Jepara tidak sebesar sumbangsih pendapat laki-laki. Jumlah sumbangsih pendapat mereka berkisar 23 sampai dengan 24 persen. Angka ini memperlihatkan adanya peran perempuan dalam sumbangan pendapat di Kabupaten Jepara.



Gambar 4. Perkembangan Sumbangan Pendapatan Perempuan di Kabupaten Jepara Tahun 2018 – 2021 (persen). Sumber : Statistik Gender Kabupaten Jepara 2021 (BPS Jepara, 2022)

Perkembangan yang menggembirakan tentang perempuan yang semakin berkontribusi di sektor publik ternyata tidak selalu berbanding lurus dengan keharmonisan di rumah tangga. Masih banyak dijumpai cerai gugat sebagai akibat dari “kemapanan” yang dimiliki oleh perempuan. Berdasarkan laporan Pengadilan Agama Kabupaten Jepara pada paruh kedua tahun 2023, sebanyak 1.376 masyarakat mengajukan cerai. Diprediksi, penghujung Desember perceraian meningkat menjadi 2.300 sampai 2.400 kasus. Angka ini justru menjadi semakin mencengangkan sebab menurut hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jepara, Sujadi, perceraian di Jepara telah menjelma seperti tren. Alasannya beragam. Mulai dari perselingkuhan yang mencapai 76 laporan, persoalan ekonomi mencapai 300 orang, hingga perselisihan dan

pertengkaran terus menerus yang menjadi penyebab paling tinggi perceraian, sampai 424 kasus (Prayoga, 2023).

Faktor penyebab perceraian di dukung oleh adanya partisipasi pendidikan yang tidak mencapai 100 persen. Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara memperlihatkan bahwa partisipasi pendidikan pada usia 16-18 tahun dan 19-24 tahun belum mencapai 100%. Pada usia 16-18 tahun, perempuan di Kabupaten Jepara hanya berkisar 70,41% yang berpartisipasi dalam sekolah. Angka ini semakin jauh mengecil pada usia 19-24 tahun yang jumlahnya hanya 25,36% (BPS Kabupaten Jepara, 2022). Dari sini dapat diketahui bahwa perceraian yang terjadi sebagai akibat dari ketidakmatangan psikologis yang dilatarbelakangi oleh pendidikan masih cukup besar. Belum lagi persoalan kemiskinan yang juga menjadi salah satu faktor pendorong perceraian.

Sebagaimana diketahui bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Jepara pada Maret 2022 sebesar 6,88 persen, menurun 0,56 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya, Maret 2021, yang sebesar 7,44 persen. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jepara pada Maret 2022 sebesar 89,08 ribu orang, menurun 6,14 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya, Maret 2021, yang sebesar 95,22 ribu orang. Garis Kemiskinan di Kabupaten Jepara pada Maret 2022 tercatat sebesar Rp442.618,-/kapita/bulan meningkat Rp23.590,-/kapita/bulan dibandingkan tahun sebelumnya, Maret 2021, yang sebesar Rp419.028,-/kapita/bulan (BPS Kabupaten Jepara, 2023).

Jenis Kelamin	Angka Partisipasi Sekolah			
	7-12	13-15	16-18	19-24
1	2	3	4	5
Laki-laki	98,91	97,78	67,42	20,26
Perempuan	100	99,11	70,41	25,36
Laki-laki dan Perempuan	99,46	98,35	69,07	22,73

Tabel 2 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Jepara, 2021. Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara (BPS Kabupaten Jepara, 2022)

Perceraian sebagai Dampak Emansipasi Perempuan

Emansipasi perempuan buruh pabrik garmen memiliki dampak tersendiri. Emansipasi buruh perempuan dapat menjadi media pemberdayaan perempuan, peningkatan kesejahteraan, peningkatan kualitas kerja, dan peningkatan kesetaraan gender. Perempuan di Kabupaten Jepara yang bekerja di pabrik garmen terberdayakan dengan adanya pabrik-pabrik tersebut. Mereka dapat bekerja pada PT. Hwaseung Indonesia atau lebih di kenal dengan PT. HWI, PT Kanindo Makmur jaya, PT. Jiale Indonesia Textil, PT. Starcam Apparel Indonesia, PT Samwon Busana Indonesia, PT. Bunga Matahari Jepara, PT. SAMI JF atau PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia, dan PT. Parkland World Indonesia. Dengan kemampuan yang mereka miliki berdasarkan pada kriteria yang ditentukan oleh perusahaan, buruh pabrik perempuan dapat memiliki kemandirian ekonomi, bahkan sosial. Mereka memiliki penghasilan

di atas Rp. 2.272.626. Status sosial mereka pun dapat meningkat, seiring dengan peningkatan ekonomi mereka. Lebih jauh, perempuan buruh pabrik garmen dapat mengambil keputusan secara mandiri terkait dengan keuangan, kesehatan, bahkan pendidikan mereka. Ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Nainggolan bahwa emansipasi perempuan dapat membawanya untuk menuntut ilmu pengetahuan, sehingga mereka dapat berfikir maju seperti kaum laki-laki (Nainggolan, 2021).

Perempuan dapat bekerja dan memperoleh penghasilan. Dengan penghasilan yang mereka dapatkan itu, bisa menjadikan mereka mampu meningkatkan kesejahteraan. Sampai di sini perjuangan kaum perempuan agar harkat dan martabatnya bisa sejajar dengan kaum laki-laki dapat terlihat. Apalagi, jika mengacu pada data yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), indeks pembangunan manusia antara laki-laki dengan perempuan di Kabupaten Jepara selisihnya hanya 7%. Sedangkan partisipasi sekolah laki-laki dan perempuan pada usia mulai dari 13 sampai 24 tahun jumlahnya masih lebih besar perempuan daripada laki-laki. Sampai di sini, pernyataan Qasim Amin tentang pemberian hak pendidikan yang setara antara laki-laki dengan perempuan terbukti (Siregar, 2017). Pendidikan yang perempuan dapatkan mampu meningkatkan kesejahteraan bagi perempuan. Emansipasi perempuan dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan keluarga. Dengan penghasilan yang lebih baik dan pengetahuan yang lebih luas, perempuan dapat memberikan pendidikan yang lebih baik dan perawatan kesehatan untuk anak-anak mereka.

Perempuan merasa lebih mandiri dan dihargai dalam lingkungan kerja. Mereka cenderung memiliki motivasi yang lebih tinggi dan produktivitas yang lebih baik. Ini bisa menguntungkan perusahaan garmen. Sebab emansipasi telah mendorong perempuan untuk berperan sama dengan laki-laki (Riyadi, 2015). Lebih lanjut, perempuan dapat membantu mengurangi kesenjangan gender di Kabupaten Jepara.

Berbagai dampak di atas, jika ditelisik lebih dalam, ternyata dapat membawa pada sebuah dampak krusial, yakni perceraian. Perceraian didukung dengan adanya resistensi sosial. Emansipasi perempuan dalam masyarakat yang masih patriarki sering kali menghadapi resistensi dari keluarga dan masyarakat sekitar. Perubahan dalam peran tradisional perempuan dari seputar sumur, dapur dan kasur atau macak, manak, dan masak, dapat menimbulkan konflik dalam keluarga. Salah satu diantara penyebabnya adalah peningkatan ekonomi yang kemudian berdampak pada kemandirian perempuan. Bahkan, persoalan ekonomi ini menjadi latar belakang terjadi perceraian di Kabupaten Jepara. Jumlahnya mencapai 300 orang (Prayoga, 2023). Peningkatan ekonomi perempuan menjadikan mereka mandiri, memiliki ketahanan ekonomi, hingga penghasilan yang lebih tinggi dari suami, yang pada akhirnya menganggap remeh suami.

Faktor ekonomi menjadi penyebab yang tidak mudah untuk diurai. Apalagi persentase penduduk miskin di Kabupaten Jepara pada Maret 2022 masih sebesar 6,88 persen atau 89,08 ribu orang (BPS Kabupaten Jepara, 2023). Kondisi di ini ditambah dengan adanya peningkatan beban kerja. Beban kerja sebagai dampak negatif kedua bagi emansipasi perempuan buruh pabrik garmen di Kabupaten Jepara. Ketika perempuan mendapatkan lebih banyak tanggung

jawab di rumah tangga dan di tempat kerja, mereka dapat mengalami peningkatan beban kerja yang berdampak pada kesehatan fisik dan mental mereka. Hasilnya, tekanan-tekanan fisik dan psikologis menjadikan perempuan sangat mungkin berselisih dan terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga. Perselisihan dan pertengkaran ini memberi sumbangsih signifikan dan menjadi penyebab paling tinggi perceraian. Pengadilan Agama Kabupaten Jepara mencatat, setidaknya ada 424 kasus perceraian sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut (Prayoga, 2023).

Ketidakseimbangan hidup kerja-rumah juga menjadi penyebab perceraian. Emansipasi perempuan sering kali berarti bahwa mereka harus mengelola peran ganda sebagai pekerja dan ibu rumah tangga telah membawa ketidakseimbangan bagi perempuan. Hal ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan antara hidup kerja dan kehidupan pribadi, yang berpotensi merusak kesejahteraan fisik dan emosional perempuan. Era pro-emansipasi telah mendorong perempuan harus menjalankan peran ganda tanpa harus meninggalkan kodratnya sebagai perempuan. Hal inilah yang disebut oleh Riyadu sebagai tantangan terbesar bagi perempuan (Riyadi, 2015). Sayangnya, tidak sedikit diantara mereka yang tidak mampu beradaptasi, hingga pada akhirnya memutuskan untuk bercerai dari suami.

Tekanan untuk mencapai emansipasi dan memenuhi peran ganda dapat menyebabkan stres mental dan masalah kesehatan mental lainnya di kalangan perempuan buruh pabrik garmen. Ini menjadi dampak yang keempat bagi emansipasi perempuan buruh pabrik garmen di Kabupaten Jepara. Tantangan dan tekanan psikologis menyebabkan perempuan beralih pada hal-hal yang membuat mereka bisa “terbebas” secara psikologis dari tekanan-tekanan yang mereka alami. Meskipun “kebebasan” yang mereka peroleh hanya sesaat. Oleh sebab itu, muncul praktik-praktik menghibur diri dengan melakukan pacaran, perselingkuhan, hingga praktik-praktik prostitusi. Tekanan psikologis, serta tantangan-tantangan yang mereka hadapi di dunia kerja, keluarga, dan masyarakat inilah yang melahirkan praktik-praktik ketidaksesuaian dengan norma-norma susila. Akhirnya, bagi perempuan yang sudah bersuami, perceraian menjadi pilihan, bahkan lebih dari itu, menjadi tren di kalangan para buruh pabrik garmen perempuan di Kabupaten Jepara (Prayoga, 2023).

Conclusion

Ternyata, emansipasi perempuan buruh pabrik garmen di Kabupaten Jepara dapat berdampak pada perceraian. Perceraian menjadi sebuah hal yang dianggap sebagai tren bagi buruh pabrik perempuan. Sebab adanya berbagai macam faktor seperti faktor ekonomi, resistensi sosial, ketidakseimbangan hidup kerja-rumah, hingga tekanan psikologis. Penelitian ini memiliki kelemahan pada pengambilan data yang hanya menggunakan literatur dan dokumen. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melengkapi penelitian ini dengan menggunakan observasi dan wawancara untuk pengumpulan data, agar data yang diperoleh lebih komprehensif. Peneliti selanjutnya juga bisa menggunakan pendekatan kuantitatif agar diperoleh perspektif yang berbeda.

Bibliography

- Admin. (2024). 8 Pabrik Garmen Terbesar Pengguna Ribuan Tenaga Kerja di Jepara. Tarunajati.My.Id. <https://tarunajati.my.id/pabrik-garmen-terbesar-di-jepara-tahun-ini/>
- BPS Jepara. (2022). Potret Gender Kabupaten Jepara Tahun 2021.
- BPS Kabupaten Jepara. (2022). Profil Pendidikan Kabupaten Jepara 2021.
- BPS Kabupaten Jepara. (2023). Kemiskinan Kabupaten Jepara Maret 2022 (Issue 01). <https://brebeskab.bps.go.id/pressrelease/2020/12/16/172/kemiskinan-kabupaten-brebes-maret-2020.html>.
- Fadilah, S. (2018). Kesetaraan gender : Fenomena pergeseran peran ekonomi wanita dari tulang rusuk menjadi tulang punggung. Gender Dan Anak.
- KEMENKO PMK. (2019). Optimalisasi Peran Perempuan Dalam Pembangunan. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Kusrini, E., & Suryani, I. P. (2022). Peran Buruh Pabrik Perempuan dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Gemiring Kidul Kecamatan Nalumsari). *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v10i1.14977>
- Lutviani, L. (2022). Gender Equality dan Urgensinya Bagi Ketahanan Keluarga di Kecamatan Bangsri Jepara. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*. <https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i2.3992>
- Mayangsari, M. D., & Amalia, D. (2018). KESEIMBANGAN KERJA-KEHIDUPAN PADA WANITA KARIR. *Jurnal Ecopsy*. <https://doi.org/10.20527/ecopsy.v5i1.4884>
- Nainggolan, B. (2021). Emansipasi Wanita (Telaah atas Pemikiran Qasim Amin). *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*.
- Nuryati. (2015). Feminisme dalam Kepemimpinan. *Istinbath*.
- Prayoga, M. A. (2023). Desember, Angka Perceraian di Jepara Diprediksi Capai 2.400 Kasus. *Joglojateng.Com*. [https://joglojateng.com/2023/07/07/desember-angka-perceraian-di-jepara-diprediksi-capai-2-400-kasus/#:~:text=JEPARA%2C%20Joglo%20Jateng%20-%20Memasuki%20paruh,sebanyak 1.376 masyarakat mengajukan cerai.](https://joglojateng.com/2023/07/07/desember-angka-perceraian-di-jepara-diprediksi-capai-2-400-kasus/#:~:text=JEPARA%2C%20Joglo%20Jateng%20-%20Memasuki%20paruh%2C%20sebanyak%201.376%20masyarakat%20mengajukan%20cerai.)
- Riyadi, I. (2015). Emansipasi Wanita dan Peran Ibu. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Saidah, F. (2019). Analisis Dispensasi Nikah Dan Kaitannya Dengan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Jepara. *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*.
- Setyagama, A. (2014). Beberapa Persepsi Tentang Perjuangan Emansipasi Wanita Ditinjau Dari Budaya Dan Agama. *IUS*.

This page is intertionally left blank